

Formulasi Kebijakan Publik : Konsep Dan Penelitian

Syuga Firda I.M¹, Syifa Heryani², Bunga Mutiara N.I.J³, Nadya Permatasari H⁴, M. Firman Firdaus⁵, Dekha Sevitan⁶, Dian Herdiana⁷

Hukum TataNegara (Siyasah), UIN Sunan Gunung Djati Bandung

¹syugafirda@gmail.com, ²syifaherya12@gmail.com, ³bungamutiara401@gmail.com, ⁴nadyapermatasarihermawan@gmail.com,

⁵muhammadfirmanfirdaus407@gmail.com, ⁶dekhassevitananugerah@gmail.com, Dianherdiana@uinsgd.ac.id⁷

Abstrak

Formulasi kebijakan publik merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam proses perumusan kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik. Tahapan ini mencakup identifikasi masalah, perumusan alternatif solusi, serta penilaian terhadap berbagai pilihan kebijakan yang tersedia. Dalam prosesnya, formulasi kebijakan melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, yang masing-masing membawa kepentingan, perspektif, dan sumber daya tertentu. Keberhasilan dalam tahap formulasi akan sangat menentukan efektivitas implementasi dan hasil akhir dari kebijakan publik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap proses formulasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi penting untuk menghasilkan kebijakan yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: formulasi kebijakan, kebijakan publik, proses kebijakan, aktor kebijakan, perumusan masalah.

PENDAHULUAN

Formulasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan yang menentukan arah dan efektivitas kebijakan yang akan diimplementasikan. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, perumusan alternatif solusi, serta penilaian terhadap berbagai opsi kebijakan yang tersedia. Keberhasilan dalam tahap formulasi sangat mempengaruhi hasil akhir dari kebijakan tersebut. Menurut (Dunn, 2018), formulasi kebijakan adalah proses sintesis mendalam terhadap permasalahan untuk mengembangkan alternatif solusi yang efektif. Dalam konteks Indonesia, formulasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor politik, seperti stabilitas pemerintahan dan dinamika partai politik, dapat mempengaruhi prioritas agenda kebijakan.

Faktor ekonomi, seperti kondisi fiskal negara, menentukan kelayakan dan sumber daya untuk implementasi kebijakan. Sementara itu, faktor sosial dan budaya mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dirumuskan. Proses formulasi kebijakan juga melibatkan berbagai aktor, baik dari dalam maupun luar pemerintahan. Aktor dalam pemerintahan meliputi eksekutif, legislatif, dan birokrasi, sementara aktor luar pemerintahan mencakup kelompok kepentingan, masyarakat sipil, dan sektor swasta (Prasetyo, 2010). Interaksi antara aktor-aktor ini dapat bersifat horizontal, vertikal, atau antar lembaga, yang masing-masing membawa kepentingan dan perspektif berbeda.

Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang konsep dan proses formulasi kebijakan publik sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji teori-teori formulasi kebijakan, tahapan-tahapan yang dilalui, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan formulasi kebijakan publik.

METODE

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- Identifikasi Topik dan Rumusan Masalah
- Peneliti merumuskan permasalahan terkait tantangan dalam proses perumusan kebijakan publik di tingkat nasional/daerah.
- Serta Pengumpulan Sumber Pustaka
- Literatur dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, dan dokumen resmi dari lima tahun terakhir, menggunakan database seperti Google Scholar, Scopus, dan Perpustakaan Nasional.
- Dan Sumber diklasifikasi berdasarkan kategori kebijakan (sosial, ekonomi, lingkungan), pendekatan formulasi (rasional, inkremental, partisipatif), dan aktor yang terlibat.

Peneliti juga menginterpretasi hasil telaah pustaka untuk membangun pemahaman menyeluruh mengenai proses dan tantangan formulasi kebijakan.

Peneliti juga menginterpretasi hasil telaah pustaka untuk membangun pemahaman menyeluruh mengenai proses dan tantangan formulasi kebijakan.

Data dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Peneliti membaca dan menginterpretasikan setiap literatur, lalu mengidentifikasi tema-tema utama yang berulang, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi proses formulasi kebijakan, peran aktor, hambatan, dan praktik terbaik. Proses analisis dilakukan melalui langkah yaitu Reduksi data yang dimana memilah informasi relevan dari sumber yang telah dikaji. Lalu Koding tema yaitu mengelompokkan isi pustaka berdasarkan konsep kunci. Dan yang terakhir Penarikan kesimpulan yaitu menyusun kerangka konseptual sebagai hasil sintesis literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Konsep Formulasi Kebijakan Publik

Secara Etimologis Formulasi berasal dari bahasa Latin "*formulare*", yang berarti merumuskan atau menyusun secara sistematis. Sedangkan Kebijakan berasal dari kata dasar "*bijak*", yang berarti tindakan yang didasarkan pada akal dan pertimbangan yang matang (Nugroho, 2014). Dan Publik berasal dari bahasa Latin "*publicus*", yang berarti umum, milik masyarakat, atau bersifat terbuka untuk umum. Formulasi kebijakan publik merujuk pada tahapan pertama dalam siklus kebijakan yang melibatkan identifikasi permasalahan yang perlu diselesaikan, pengembangan alternatif kebijakan, serta pemilihan solusi terbaik yang akan diterapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Proses formulasi ini penting karena menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Formulasi kebijakan sebagai suatu proses menurut Winarno, dapat dipandang dalam 2 (dua) macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Sejalan dengan pendapat Winarno, maka dalam (Islamy, 2021) Membagi proses formulasi kebijakan kedalam tahap perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan

Definisi Konsep Formulasi Kebijakan Menurut Para Ahli

Formulasi kebijakan adalah tahapan esensial dalam proses perumusan kebijakan publik yang berfungsi sebagai jembatan antara pengenalan masalah dan penetapan keputusan kebijakan. Tahap ini mencakup berbagai proses sistematis, seperti pengumpulan data, analisis situasi, perumusan alternatif kebijakan, dan pemilihan solusi terbaik dari berbagai opsi yang tersedia. Dalam praktiknya, formulasi kebijakan bukan sekadar kegiatan administratif atau teknokratik, tetapi juga sarat dengan dinamika politik, ekonomi, sosial, bahkan budaya. Ada pun definisi Formulasi Kebijakan Publik Menurut menurut para ahli sebagai berikut:

- a. James E. Anderson mendefinisikan formulasi kebijakan sebagai proses pengembangan proposal tindakan yang dapat diterima untuk mengatasi masalah tertentu. Artinya, tahapan ini tidak hanya tentang merancang kebijakan secara logis dan rasional, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor penerimaan publik, legitimasi politik, serta sumber daya yang tersedia (Alaslan & Rijal, 2023).
- b. William N. Dunn, sebagaimana dikutip oleh (Alaslan & Rijal, 2023), menegaskan bahwa formulasi kebijakan merupakan proses pengembangan dan sintesis terhadap berbagai alternatif pemecahan masalah. Ini menunjukkan bahwa dalam tahap ini, aktor-aktor kebijakan tidak hanya mencari solusi tunggal, melainkan mengembangkan beberapa pilihan tindakan berdasarkan analisis komprehensif yang mempertimbangkan efek jangka pendek maupun panjang. Proses ini juga menuntut keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), baik dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat sipil. Peran partisipasi publik menjadi penting karena dapat memperkaya substansi kebijakan dan meningkatkan legitimasi kebijakan tersebut di mata masyarakat.
- c. (Winarno, 2002) menyatakan bahwa formulasi kebijakan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam seluruh proses ketertiban umum. Tahapan ini menjadi dasar bagi fase-fase selanjutnya seperti implementasi dan evaluasi. Jika formulasi tidak dilakukan secara cermat, maka pelaksanaan kebijakan bisa mengalami kegagalan, baik dari sisi teknis, administratif, maupun dalam pencapaian tujuan akhir kebijakan. Dalam kerangka yang lebih praktis, Eugene Bardach, yang dikenal luas lewat pendekatannya dalam policy analysis, menyatakan bahwa formulasi kebijakan adalah proses identifikasi alternatif dan penilaian sistematis terhadap mana yang paling layak diterapkan. Menurutnya, pembuatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk menyelaraskan tujuan-tujuan publik dengan kenyataan politik dan keterbatasan sumber daya.

Model-Model Formulasi Kebijakan Publik

Pemahaman mengenai model-model formulasi kebijakan public sangat penting bagi para praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam proses kebijakan publik untuk dapat merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Ada pun model-model formulasi kebijakan public sebagai berikut (Kadji, 2015):

- a. Model Rasional

Model rasional merupakan pendekatan normatif yang menggambarkan proses pengambilan kebijakan secara sistematis dan logis. Model ini berasumsi bahwa pembuat kebijakan memiliki tujuan yang jelas, informasi yang lengkap, dan kemampuan untuk menganalisis semua alternatif sebelum memilih opsi terbaik. Dye menyatakan bahwa proses ini melibatkan identifikasi masalah, perumusan tujuan, pencarian alternatif, evaluasi, dan pemilihan solusi paling efisien. Namun, model ini sering dikritik karena tidak realistis dalam konteks keterbatasan informasi dan kapasitas pengambil kebijakan.

b. Model Inkremental

Model inkremental dikembangkan oleh Lindblom melalui konsep 'muddling through'. Dalam model ini, kebijakan dibentuk melalui proses perubahan bertahap dari kebijakan sebelumnya. Pengambil kebijakan tidak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua alternatif, melainkan hanya membandingkan sedikit perubahan yang mungkin dilakukan. Kelebihan model ini terletak pada kesederhanaannya dan kemampuannya menghindari konflik besar, namun kelemahannya adalah terbatasnya inovasi dan cenderung mempertahankan status quo.

c. Model Campuran

Amitai Etzioni mengembangkan model campuran atau mixed scanning sebagai gabungan dari pendekatan rasional dan inkremental. Model ini menyarankan bahwa perumusan kebijakan harus diawali dengan pemindaian umum secara rasional untuk menetapkan arah kebijakan, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah inkremental untuk implementasi. Model ini dianggap lebih realistis karena menyeimbangkan antara kebutuhan perencanaan jangka panjang dan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan.

d. Model Elitisme

Model elitisme berpandangan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil keputusan kelompok elit yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi. Dalam model ini, proses formulasi tidak bersifat partisipatif melainkan eksklusif. Dye menjelaskan bahwa elit menentukan agenda dan solusi kebijakan, sementara masyarakat umum hanya mengikuti. Model ini menjelaskan realitas dalam sistem politik yang hierarkis, namun sering kali mengabaikan prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik.

e. Model Sistem

Dikembangkan oleh David Easton yang memandang bahwa proses kebijakan publik sebagai respon sistem politik terhadap tuntutan dan dukungan dari lingkungannya. Kebijakan publik dipandang sebagai output dari sistem politik yang dipengaruhi oleh input (tuntutan dan dukungan) dan umpan balik. Model ini melihat kebijakan publik sebagai hasil dari proses konversi dalam "kotak hitam" sistem politik yang mengubah input menjadi output kebijakan. Meskipun model ini menyediakan Kerangka kerja komprehensif berarti utamanya adalah terlalu menyederhanakan kompleksitas proses politik dan kurang menjelaskan dinamika kekuasaan dalam "kotak hitam" tersebut (Subarsono, 2019).

Proses Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan, di mana ide dan gagasan diolah menjadi alternatif kebijakan yang konkret. Tahap ini terjadi setelah masalah publik berhasil diidentifikasi dan diagenda oleh pembuat kebijakan. Dalam proses ini, berbagai pihak terlibat, termasuk aktor negara (seperti eksekutif dan legislatif), aktor non-negara (seperti LSM, akademisi, dan masyarakat sipil), serta kelompok kepentingan yang relevan dengan isu yang diangkat. Keterlibatan multi-aktor menjadikan formulasi kebijakan sebagai arena negosiasi politik dan teknokratis yang kompleks (Pujiono dkk., 2022).

Proses formulasi kebijakan melibatkan serangkaian aktivitas seperti pengumpulan data, analisis masalah, perumusan berbagai alternatif kebijakan, serta evaluasi atas dampak yang mungkin ditimbulkan dari masing-masing alternatif. Dalam konteks ini, kualitas formulasi kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas informasi dan analisis yang digunakan. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan ilmiah dan partisipatif menjadi penting untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya rasional, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Adani, 2023).

Salah satu tantangan utama dalam formulasi kebijakan di Indonesia adalah minimnya koordinasi antar lembaga, serta masih kuatnya kepentingan politik dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sering menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak berbasis pada kebutuhan publik, melainkan lebih kepada kompromi politik. Kebijakan publik di Indonesia cenderung bersifat elitis, di mana keputusan lebih banyak ditemukan oleh aktor-aktor dominan yang memiliki akses terhadap kekuasaan (Septiana dkk., 2023).

Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi membuka peluang baru untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses formulasi kebijakan. Platform digital memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung terhadap isu-isu kebijakan yang tengah dirumuskan. Dalam praktiknya partisipasi publik ini masih perlu diperkuat dengan regulasi dan mekanisme yang memastikan keterlibatan masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan.

Dalam merumuskan kebijakan publik, yang dibutuhkan bukan hanya memilih solusi terbaik dari sejumlah opsi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara transparan, inklusif, dan berbasis data. Proses perumusan kebijakan yang dilakukan secara tertutup atau tidak melibatkan banyak pihak berisiko menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengembangan sistem informasi yang terbuka dan akurat menjadi syarat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan efektif.

Namun pada praktiknya, sebagaimana dikritisi oleh Adinegoro dkk. (2025), implementasi kebijakan Satu Data Indonesia justru memperlihatkan adanya tantangan serius dalam hal keterbukaan informasi. Kebijakan ini yang awalnya diharapkan mendorong integrasi data dan akses publik, ternyata dihadapkan pada masalah lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, serta kecenderungan pemerintah untuk membatasi akses data tertentu. Hal ini menjadi ironi, karena sistem data yang tertutup justru dapat menghambat proses perumusan kebijakan yang berbasis bukti dan partisipatif.

a. Tahap Pertama

Dalam formulasi kebijakan adalah mengidentifikasi masalah publik. Tahapan ini sangat memerlukan data yang valid, lengkap, dan bisa diakses. Tanpa dukungan informasi yang memadai, masalah yang dipilih bisa saja bukan masalah

prioritas, atau bahkan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, keterbukaan data menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan benar-benar lahir dari persoalan yang nyata di lapangan.

b. Tahap kedua

Penyusunan berbagai alternatif solusi, keberadaan sistem informasi yang terbuka sangat membantu dalam menjaring masukan dari berbagai pihak. Proses seperti forum konsultasi publik atau diskusi kelompok terarah akan lebih kaya jika para peserta memiliki akses pada data yang relevan. Sebaliknya, jika data hanya dikuasai oleh aktor tertentu, maka penyusunan kebijakan berisiko menjadi elitis dan kurang inklusif.

c. Tahap ketiga

Analisis dan pemilihan alternatif kebijakan. Di tahap ini, data yang berkualitas dibutuhkan untuk melakukan penilaian terhadap berbagai opsi yang ada. Metode analisis seperti cost-benefit analysis, risk assessment, maupun stakeholder analysis tidak dapat dijalankan dengan baik jika data yang dibutuhkan tidak tersedia atau sulit diakses. Tanpa dasar data yang kuat, keputusan cenderung didorong oleh kepentingan politik atau kompromi birokratis yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik.

Secara umum, formulasi kebijakan publik di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi informasi dan keterlibatan publik. Studi Adinegoro dkk. (2025) menunjukkan bahwa meskipun sudah ada inisiatif seperti Satu Data Indonesia, dalam praktiknya masih banyak hambatan dalam mewujudkan keterbukaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, reformasi sistem informasi kebijakan menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik ke depan—dengan mendorong keterbukaan, partisipasi, dan penggunaan data sebagai dasar utama dalam setiap keputusan kebijakan.

Asumsi-Asumsi Tentang Formulasi Kebijakan Publik

a. Masalah Publik Bisa Diidentifikasi dan Dirumuskan

Asumsi pertama dalam formulasi kebijakan publik adalah bahwa masalah publik dapat dikenali, diidentifikasi, dan dirumuskan secara sistematis. Dalam konteks ini, diyakini bahwa setiap persoalan yang muncul di masyarakat bukanlah sesuatu yang kabur atau tidak jelas, melainkan dapat dianalisis dengan pendekatan ilmiah atau partisipatif. Proses perumusan masalah ini sangat penting karena kesalahan dalam mengidentifikasi masalah akan berpengaruh pada kualitas kebijakan yang dirumuskan. Misalnya, dalam menangani kemiskinan, kebijakan yang efektif hanya bisa dirumuskan jika akar permasalahan kemiskinan (apakah karena pengangguran, inflasi, rendahnya pendidikan, atau akses layanan dasar) dapat dikenali secara tepat.

b. Tersedia Berbagai Alternatif Solusi

Formulasi kebijakan publik berasumsi bahwa setiap masalah publik memiliki lebih dari satu kemungkinan solusi, sehingga tugas pembuat kebijakan adalah mengidentifikasi dan membandingkan alternatif-alternatif tersebut. Solusi yang dipilih harus berdasarkan evaluasi yang rasional, mempertimbangkan biaya, manfaat, dampak sosial, dan tingkat kelayakan politik. Misalnya, untuk mengurangi polusi udara, bisa dipertimbangkan berbagai alternatif seperti pembatasan kendaraan bermotor, transisi ke transportasi publik ramah lingkungan, atau regulasi industri. Dalam hal ini, formulasi kebijakan adalah proses kreatif dan analitis untuk menyusun opsi terbaik.

c. Aktor-Aktor Terlibat dalam Proses Perumusan

Asumsi ketiga adalah bahwa formulasi kebijakan bukanlah proses yang eksklusif dilakukan pemerintah, melainkan merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai aktor. Aktor-aktor ini meliputi pembuat undang-undang (legislatif), birokrasi pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media massa, dan warga masyarakat secara umum. Perumusan kebijakan yang baik biasanya bersifat inklusif dan partisipatif, artinya melibatkan masukan dari berbagai pihak yang terkena dampak atau berkepentingan. Keterlibatan ini menciptakan legitimasi dan memperkaya pilihan-pilihan kebijakan dengan berbagai perspektif.

d. Kebijakan Didasarkan pada Informasi dan Analisis yang Rasional

Salah satu asumsi penting dalam formulasi kebijakan publik adalah bahwa kebijakan yang baik harus berbasis data, bukti ilmiah, dan analisis rasional. Ini berarti keputusan tidak diambil berdasarkan intuisi semata, tekanan politik, atau kepentingan kelompok tertentu, tetapi melalui proses analisis mendalam tentang permasalahan yang dihadapi. Dalam praktiknya, ini melibatkan penggunaan data statistik, kajian akademis, hasil riset kebijakan, serta prediksi dampak dari setiap alternatif kebijakan yang dirumuskan. Misalnya, dalam merumuskan kebijakan subsidi energi, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan data konsumsi energi, dampaknya terhadap inflasi, serta efisiensi anggaran negara.

e. Ada Tujuan Publik yang Ingin Dicapai

Formulasi kebijakan publik diasumsikan bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum (public interest). Kebijakan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, melainkan harus dirancang agar memberikan dampak positif yang luas dan adil. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan, aspek keadilan sosial, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi pertimbangan utama. Asumsi ini penting untuk menjaga agar kebijakan tetap pada jalur etis dan moral, terutama dalam negara demokratis yang mengedepankan kepentingan rakyat.

f. Formulasi Bersifat Dinamis dan Iteratif

Proses formulasi kebijakan publik juga diasumsikan tidak bersifat kaku atau sekali jadi, melainkan bersifat dinamis dan iteratif. Artinya, proses ini bisa berulang, mengalami revisi, dan berubah tergantung pada masukan baru, perubahan situasi, atau kegagalan dalam tahap implementasi. Dalam realitasnya, kebijakan sering kali perlu disesuaikan karena kondisi masyarakat berubah, teknologi berkembang, atau terjadi krisis yang tak terduga. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan publik harus fleksibel dan adaptif terhadap dinamika tersebut (Subarsono, 2019).

Aktor-Aktor Yang Melakukan Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan publik adalah proses membuat berbagai solusi untuk masalah publik dan memilih yang terbaik untuk diterapkan. Berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil, sangat penting dalam proses ini. Setiap aktor memiliki kepentingan, kekuatan, dan strategi tertentu dalam mempengaruhi proses formulasi kebijakan. Untuk memahami dinamika pembentukan kebijakan publik, kita harus tahu siapa aktor dan peran apa yang mereka mainkan. Aktor utama dalam formulasi kebijakan adalah lembaga eksekutif, seperti presiden, menteri, gubernur, dan bupati. Mereka memiliki kewenangan formal untuk mengajukan dan merancang kebijakan berdasarkan kebutuhan daerah atau nasional. Pejabat eksekutif memiliki peran kunci dalam menetapkan prioritas masalah dan menetapkan alternatif kebijakan yang akan dipilih. Di tingkat lokal, kepala daerah sering kali menjadi motor utama dalam menginisiasi formulasi kebijakan berdasarkan kebutuhan spesifik wilayahnya.

Selain eksekutif, lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD juga bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan. Mereka tidak hanya membahas dan menyetujui rancangan kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan yang diusulkan eksekutif. Dalam Analisis Kebijakan Publik, Subarsono menyatakan bahwa anggota legislatif sering memasukkan aspirasi masyarakat konstituen ke dalam proses pembuatan kebijakan, yang membuat proses formulasi kebijakan lebih demokratis. Birokrasi pemerintahan juga menjadi aktor yang berpengaruh dalam tahap formulasi. Pegawai negeri sipil di kementerian atau dinas daerah seringkali bertindak sebagai teknokrat yang menyiapkan kajian-kajian akademik dan administrasi kebijakan. Birokrasi tidak hanya menjalankan keputusan, tetapi juga berperan dalam menyusun berbagai alternatif kebijakan berdasarkan data dan analisis teknis yang tersedia.

Kelompok kepentingan atau interest groups juga merupakan aktor penting dalam formulasi kebijakan. Mereka terdiri dari asosiasi bisnis, serikat pekerja, organisasi lingkungan, dan sebagainya. Kelompok ini melakukan lobi, advokasi, dan kampanye untuk mempengaruhi kebijakan agar sejalan dengan kepentingan mereka. Kelompok kepentingan memiliki peran besar dalam memperkaya alternatif-alternatif kebijakan melalui penyampaian data, informasi, dan tekanan politik. Media massa berfungsi sebagai aktor yang membentuk opini publik dan mendorong agenda setting dalam formulasi kebijakan. Media dapat memperbesar isu tertentu hingga menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam konteks Indonesia, media sering kali menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta kritik terhadap proses formulasi kebijakan. Akademisi dan lembaga riset juga memberikan kontribusi penting dalam formulasi kebijakan. Mereka menghasilkan berbagai studi, kajian kebijakan, dan rekomendasi berbasis evidence-based policy. Perguruan tinggi, lembaga think tank, dan lembaga penelitian kerap diundang dalam konsultasi publik untuk memperkaya bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan (Subarsono, 2019).

Masyarakat sipil atau civil society seperti LSM, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas juga berperan dalam formulasi kebijakan. Mereka mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dan memastikan suara kelompok rentan terdengar. Keterlibatan masyarakat sipil meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi proses kebijakan. Tidak kalah penting, aktor internasional seperti lembaga donor, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional juga dapat mempengaruhi formulasi kebijakan nasional, terutama dalam bidang-bidang seperti lingkungan hidup, kesehatan, dan pendidikan. Mereka biasanya berperan melalui pemberian dana, bantuan teknis, dan penyusunan standar internasional yang harus diadopsi negara. Dengan demikian, formulasi kebijakan publik diwarnai oleh interaksi kompleks antar berbagai aktor dengan beragam kepentingan dan kekuasaan. Menyadari keberagaman aktor ini sangat penting agar formulasi kebijakan dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Studi tentang aktor-aktor ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana kebijakan publik akhirnya terbentuk dan diterapkan (Winarno, 2002).

KESIMPULAN

Formulasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, merancang berbagai alternatif solusi, dan memilih kebijakan terbaik yang dapat diimplementasikan secara efektif. Proses ini melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi serta faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Keberhasilan formulasi sangat bergantung pada kualitas data, analisis rasional, dan keterlibatan aktor yang luas.

Berbagai model formulasi kebijakan seperti model rasional, instrumental, campuran, sistem, dan elitisme, menunjukkan pendekatan yang beragam dalam memahami dan merancang kebijakan publik. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kelemahan, dan dalam praktiknya sering digunakan secara kombinatorial untuk menyesuaikan dengan kompleksitas permasalahan serta dinamika sosial dan politik. Dalam konteks Indonesia, tantangan utama formulasi kebijakan terletak pada koordinasi antar lembaga, dominasi, kepentingan elit, dan masih minimnya partisipasi publik yang bermakna.

Oleh karena itu, reformasi dalam proses formulasi kebijakan sangat diperlukan guna menghasilkan kebijakan yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk keterlibatan publik. Yang baik bukan hanya soal memilih solusi terbaik secara teknis, tapi juga memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara inklusif, transparan, dan berbasis pada kepentingan umum. Dengan demikian, kebijakan publik yang dihasilkan agar akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab permasalahan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Khususnya kepada ketua jurusan, Bapak Ridwan Eko Prasetyo, S.H.I., M.H., atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan karya ini, penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada dosen pengampu, Bapak Dr. Dian Herdiana, S.I.P., M.A.P., atas ilmu, motivasi, dan bimbingan yang sangat berharga dalam proses perkuliahan dan penyusunan kajian ini. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh rekan mahasiswa yang telah memberikan masukan dan berdiskusi bersama dalam pengembangan ide dan isi artikel ini. Tidak lupa, penulis mengapresiasi dukungan moral dan motivasi dari keluarga tercinta. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, P. S. (2023). Implementasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang melalui SIMAS PUU. *Jurnal Manajemen Kebijakan Publik*.
- Adinegoro, B., et al. (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis Semangat Keterbukaan dan Informasi Publik
- Alaslan, A., & Rijal, S. (2023). *Teori, Formulasi dan Aplikasi*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6 ed.). Routledge.
- Islamy, M. I. (2021). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Kadji, Y. (2015). *FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo.
- Pebriani Wahyu, F., et al. (2024). A Systematic Review of the Data-Driven Public Policy Making in Indonesia. IAPA Proceedings Conference.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Elex Media Komputido.
- Prasetyo. (2010). Orientasi Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 12(2).
- Pujiyono, B., Subiyakto, R., & Rusdiyanta. (2022). *Kebijakan Publik: Aktor, Model dan Proses*. Bintang Pustaka Madani.
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., & Suprpto, A. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi, dan Aplikasi. *PT Global Eksekutif Teknologi*.
- Subarsono, A. (2019). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.